

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi dan Implementasi Kebijakan: Harmonisasi Antar Pelaku Usaha dan Pelibatan BUMN Pangan Untuk Melindungi Peternak Rakyat

DASAR PEMIKIRAN

Pertarungan bisnis antar perusahaan besar, memacu populasi ayam yang dipeliharanya di perusahaan masing-masing membuat jumlah berlebih ayam (*overpopulated*). Dalam tahun 2020 saja, sekitar 300 juta ekor ayam dimusnahkan melalui berbagai metode karena populasi yang berlebihan. Di sisi lain, upaya membangun kandang *closed house* terus dilakukan. Berlomba-lomba membangun *closed house* terjadi di banyak kabupaten yang tampaknya disetujui oleh pemerintah setempat dengan semangat swasembada daging ayam di wilayahnya atau penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.

KAJIAN EMPIRIS

Sebenarnya *oversupply* tidak lepas dari dibukanya kran perdagangan bebas antar negara, tak terkecuali antar usaha dalam negeri. *Oversupply* kembali terjadi sejak tahun 2013 hingga sekarang masih menggema. Pasalnya peternak mengeluh karena harga ayam *livebird* sering jatuh akibat *oversupply*. Padahal perusahaan integrator vertikal atau oleh pihak yang bermitra dengan perusahaan besar. Situasi seperti ini harus dilihat dengan harmonisasi antar peternak kecil, peternak mitra, peternak besar hingga korporasi guna kelangsungan perdagangan peternakan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Diperlukan kebijakan pemerintah yang tidak tergantung terhadap pemerintah namun bersama-sama dipimpin oleh pemerintah kebijakan yang komprehensif dan bisa ke peternak rakyat untuk tegaknya keadilan dalam kegiatan ekonomi, juga harus ada keberpihakan terhadap rakyat.
2. Pemerintah perlu turun tangan agar peternak rakyat tidak musnah, karena peternak dengan kandang sederhana “akan habis” karena adopsi teknologi yang lemah, *well trained people* sangat rendah karena semua input mahal, sehingga konsorsium, aliansi, koperasi integrasi dapat menyelamatkan peternak rakyat.
3. Integrasi horizontal perlu segera diterapkan dengan pelaku utama Koperasi, perguruan tinggi, pemerintah, dan perusahaan mandiri yang terkonsolidasi. Peternak kecil diwajibkan berhimpun dalam koperasi dan membesarkan integrator horizontal.
4. Kemandirian bibit bagi peternak mandiri bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Berdikari yang sudah seharusnya mendukung peternak kecil, mandiri, dan menengah. Dan peternak mampu bersaing dengan kriteria alokasi GPS ayam ras pedaging untuk mendapatkan GPS penguasaan RPHU dan rantai dingin bahkan dengan RPHU yang kecil menerima order dari beberapa *breeding* yang diwajibkan oleh pemerintah mengambil serapan.
5. RPH harus diberi akses ke pasar konsumen. Tidak mudah jika akses karkas tidak diberikan apalagi harus bersaing dengan karkas di daerah padat artinya pasar harus menjual karkas beku. Dari RPA ke *further process* harus diberikan kemudahan efeknya pemerataan protein dari ayam supaya bisa dimakan lapisan paling bawah.
6. HPP LB maka harus stop menjual LB kepada broker tetapi jual LB ke RPHU dan CS, yang merupakan milik BUMN semua importir *breeding* GPS dan atau *feedmill nonbreeding* juga harus menampung LB.
7. Harus dilakukan proteksi kepada peternak rakyat oleh BUMN untuk *captive market* BUMN, Cadangan Pangan Nasional, Stabilisator harga pada saat HBKN sehingga ketika harga naik maka bisa distabilkan oleh BUMN.
8. Pemerintah harus memanfaatkan hadirnya BUMN PT. Berdikari di industry peternak rakyat yang selama ini masih belum optimal harus segera dioptimalkan.
9. Tipikal konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia masih bersifat *seasonal market*, maka pemerintah harus mendorong upaya peningkatan konsumsi daging ayam di Indonesia.
10. Pemerintah perlu mendukung terhadap kemudahan dalam akses pembiayaan untuk peternak mandiri yang saat ini masih banyak kendala.